

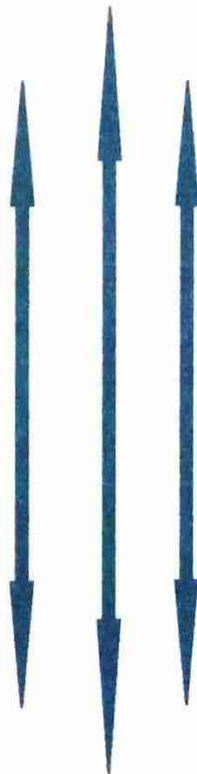


PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

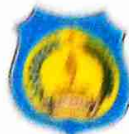
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**



Nomor : 035/EV-LAKIP/II/2024/ITDA
Tanggal : 29 FEBRUARI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144 - Faximile (0414) 22561

Benteng, 29 Februari 2024

mor : 035/EV-LAKIP/II/2024/ITDA

mp. : -

il : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2023.

Kepada

Yth Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten
Kepulauan Selayar
di -
Benteng.

Dengan ini kami sampaikan, hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor:700/021/EV-LAKIP/II/2024/ITDA tanggal 19 Februari 2024, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; serta
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja meliputi beberapa komponen penilaian, yaitu kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu;
2. Menggunakan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan;

C. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh nilai sebesar **55,66** predikat **"CC"** dengan interpretasi **"Cukup (Memadai)"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa **implementasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup (memadai), namun masih perlu perbaikan untuk peningkatan pencapaian kinerja.**

Nilai hasil evaluasi merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	17,71	19,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,69	13,80
3	Pelaporan Kinerja	15,00	8,68	8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,82	13,50
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	52,90	55,66
	Predikat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Pada Komponen Perencanaan Kinerja terdapat beberapa sub komponen, yaitu:

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

- Target pada Dokumen Renstra dan Dokumen Renja belum selaras;
- *Cascading* belum memuat Capaian Kinerja yang sesuai dengan Dokumen Renstra Perubahan;
- Belum terdapat dokumen pendukung kelengkapan laporan kinerja seperti pohon kinerja, *crosscutting*, laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan dokumen dialog kinerja.

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- Rencana aksi belum mendukung pencapaian kinerja;
- Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Pengukuran Kinerja

Pada Komponen Pengukuran Kinerja terdapat beberapa sub komponen,

yaitu:

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Belum mendapat informasi yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (Sakip pengukuran kinerja).

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan

- Belum dilakukan proses pengukuran kinerja secara berhala

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Penalti/teguran, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/teguran) besaran kinerja/penghasilan;

- Capaian kinerja (hasil pengukuran kinerja) belum dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan rotasi/mutasi jabatan.

3. Pelaporan Kinerja

Pada Komponen Pelaporan Kinerja terdapat beberapa sub komponen, yaitu:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- Dokumen Lakip belum disusun sesuai dengan standar yaitu menggunakan sistematika yang merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat beberapa sub komponen, yaitu:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak)

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar rekomendasi yang telah kami sampaikan segera ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.


INSPEKTOR DAERAH,
IRWAN HASO, S.STP,
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19800422 199912 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah di Benteng;
3. Peringgal.